

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian internal lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem Akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah. Selain sistem Akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah atau secara lebih luas Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

Menurut Mardiasmo (2002: 42) harus diakui bahwa saat ini *good governance* masih menjadi mimpi besar bagi bangsa Indonesia. Jika dilihat dari kaca mata akuntansi sektor publik, paling tidak terdapat tiga permasalahan utama mengapa *good governance* masih jauh dari kenyataan. Salah satunya yaitu belum adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Tidak adanya sistem akuntansi yang handal menyebabkan pengendalian internal pemerintah daerah. Hal tersebut dialami oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Jika sistem akuntansinya tidak memadai

maka sudah barang tentu sistem pencatatan dan pelaporan akuntansinya kurang handal.

Saat ini Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada peraturan Departemen Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan bagaimana siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu terdapat juga sistem dan prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda dimana penyajian laporan keuangan dalam sistem dan prosedur keuangan daerah ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.

Salah satu penerapan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung proses pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel maka Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah memfasilitasi pemerintah dengan aplikasi SIMDA dengan harapan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparan.

SIMDA merupakan paket terintegrasi dari pemerintah daerah. Untuk mempercepat penyusunan APBD, pelaksanaannya dan penyusunan laporan keuangan. Sejak tahun 2002 Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kerja sama dengan BPKP untuk membangun/mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan (Darise, 2008: 18). DPPKAD Kabupaten Bone Bolango mulai menggunakan aplikasi SIMDA ini sejak Tahun 2006, akan tetapi penggunaan SIMDA belum secara keseluruhan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan karena masih ada data-data yang tersajikan secara manual dan harus di posting dalam SIMDA. Mulai Tahun 2007 DPPKAD mulai full dalam penggunaan aplikasi ini dan sudah bisa *Online* ke SKPD lain. Pemerintah Daerah berharap dengan adanya aplikasi SIMDA ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah demi mewujudkan *Good Governance* untuk mendukung capaian indikator kinerja dalam meningkatkan tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Meskipun belum maksimal dalam pengelolaan SIMDA terhadap asset dan kurangnya tenaga yang professional di bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperoleh sisi positif dalam penerapan aplikasi SIMDA ini, karena dilihat dari perkembangan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013. Sedangkan pada Tahun 2008 Laporan keuangan *Disclaimer*. Penyebab

diperolehnya Opini WDP terkait dengan adanya temuan pada Aset. Menurut Bpk Jusni Bolilio selaku kepala bagian Aset pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango, Opini WTP masih sangat mahal untuk di miliki oleh Kabupaten pemekaran seperti Kabupaten Bone Bolango saat ini, pada Provinsi Gorontalo daerah yang memperoleh Opini WTP hanya baru di peroleh oleh Kabupaten Gorontalo. Mengapa, karena penyedia Laporan Aset belum bisa diyakini kewajaran/penyajiaannya oleh BPK RI. Penemuan yang tidak wajar itu antara lain misalnya, dalam kartu inventaris barang misalnya untuk Dinas Pertanian sejumlah 1 Milyar dengan rincian terbagi dalam 5 aset, ternyata yang ada dilapangan hanya ada 3 aset, sedangkan yang lainnya mungkin di akibatkan karena rusak atau sudah hilang dan keberadaannya tidak di laporkan sehingga menyebabkan asset di kualifikasi atau tidak di yakini kewajarannya.

Kedua, aset tanah yang tidak memiliki nilai wajar seperti aset tanah penyerahan dari Kabupaten Gorontalo yang tidak mempunyai Nomor kode register sehingga keberadaannya diragukan. Akan tetapi mulai Tahun 2014 satu-satunya kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo yang mulai memberlakukan Nomor Kode Register Aset atau pelabelan asset mulai dari asset tetap tanah sampai dengan asset lainnya baru Kabupaten Bone Bolango, sehingga keberadaan aset dapat mudah untuk di lacak. Dengan adanya Nomor Kode Register Aset ini dapat membantu untuk memperoleh opini WTP. Selain dengan adanya Nomor Kode Register Aset Pemerintah

Kabupaten juga mempunyai situs tersendiri untuk media transparansi aset yakni SIMDA BMD yang bisa di akses oleh para pengguna informasi dalam hal transparansi dan akuntabilitas aset. Karena menurut Bpk Jusni transparansi dan akuntabilitas perlu di lakukan mengingat dalam pengelolaan asset daerah, masyarakat berhak mengetahui/mendapat informasi tentang pengelolaan asset, sedangkan untuk akuntabilitas sendiri harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena hampir semua asset daerah diperoleh melalui dana APBD yang notabennya adalah uang rakyat.

Alasan BPK RI tidak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, yang disebabkan BPK RI tidak dapat melaksanakan pemeriksaan yang lingkupnya memadai dan BPK RI tidak mampu memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup serta tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan maupun prosedur pemeriksaan alternatif karena sistem pengendalian interen atas rekening Kas Daerah sangat lemah dan sangat tidak memadai terutama berkaitan dengan transaksi-transaksi penarikan dana dari kas daerah sebesar Rp 1.707.203.471,00, transaksi-transaksi perimaan dana di rekening BUD Pajak dan transaksi-transaksi pengeluaran dari rekening BUD Pajak yang ditarik secara tunai sebesar Rp15.394.374.363,00, sehingga atas penyajian nilai transaksi penerimaan PFK sebesar Rp 25.641.090.317,74, pengeluaran PFK sebesar Rp 22.810.267.800,37, penyajian Silpa Tahun 2008 sebesar Rp 22.313.813,587,62, kas sebesar Rp 11.064.449.870,99 dan saldo utang PFK

sebesar Rp 3.750.636.283,37, BPK RI tidak memiliki keyakinan yang memadai untuk memberikan pendapat (www.BPKP.go.id).

Diperolehnya opini WDP bukan karena kesalahan penyajian dalam penginputan/posting data kedalam aplikasi SIMDA melainkan kewajaran perolehan asset. Kabupaten Bone Bolango dalam hal transparansi mereka belum mempunyai *website* yang di gunakan untuk media publikasi, akan tetapi mereka terbuka secara langsung (observasi lapangan), dan untuk *website*-nya baru sementara dibuat tahun ini (2014).

Dengan fenomena di atas, dapat disimpulkan penerapan aplikasi SIMDA ini dapat membantu peningkatan kualitas laporan keuangan, karena membantu dalam proses penyajian laporan keuangan yang efisien, tepat waktu, serta transparansi. Sebagaimana penelitian yang di lakukan oleh Mohune (2013) Pengaruh penerapan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan hasil pengujian hipotesis Koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa SIMDA mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil estimasi di peroleh nilai koefisien determinasi R_2 sebesar 0,735 (75,3%) kualitas laporan keuangan di Kabupaten Gorontalo di pengaruhi oleh penerapan SIMDA, sedangkan 0,247 (24,7%) di pengaruhi oleh variabel lain, antara lain Sistem Pengendalian Internal dan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2013) dengan judul Analisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan SIMDA Keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk telah dilakukan secara optimal. Pengolahan data keuangan dilakukan dengan membagi fungsi pengelolaan keuangan menjadi tiga fungsi yaitu fungsi penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pembukuan/akuntansi. Penerapan pengelolaan keuangan pada fungsi penganggaran dan fungsi penatausahaan sudah dilaksanakan secara maksimal. Namun penerapan fungsi pembukuan/akuntansi tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan menu fungsi pembukuan di non-aktifkan karena merupakan kewenangan pengelolaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Aplikasi SIMDA pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango dapat membantu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, karena Aplikasi SIMDA merupakan media yang sempurna untuk pengelolaan keuangan Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bagoë (2012) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus DPPKAD Kota Gorontalo), dengan hasil penelitian bahwa Penerapan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Signifikan Terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo.

Beberapa penelitian terdahulu di atas dapat di simpulkan bahwa penggunaan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi pada pemerintah daerah dapat membantu dalam peningkatan kualitas laporan keuangan karena pengelolaannya yang tepat waktu, efektif, efisien serta transparan dan dapat di peroleh atau di akses oleh pemakai Laporan Keuangan. sebagaimana yang disebutkan oleh Djaja (2009: 87) dalam *Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 April 2013* bahwa Aplkasi SIMDA merupakan aplikasi *database* yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Pengangkat Daerah (SKPD).

Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangan yang baik. Mulai dari proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Maka dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Daerah berharap dapat membantu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis menjadikan hal ini sebagai topik dalam mengadakan penelitian yang diformulasikan dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya penerapan Sistem Informasi manajemen Daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan terutama pada bagian asset sehingga masih memperoleh predikat WDP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
2. Tahun 2007 sampai 2011 sejak diterapkannya aplikasi SIMDA, satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum diwajibkan menyusun laporan keuangan, meskipun penatausahaan keuangan telah dilakukan secara terintegritas dengan SKPD melalui program aplikasi SIMDA.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok yang diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh

penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengevaluasi penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.